**PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL
MELALUI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(UU ITE)**

**Indah Meisyana Suci, Achmad Hanif Avicenna, Sekar Marchayu Setiawan,
Rheyna Wisnu Puteri, Priscila Hosiana Deandra Sirait**

2210611124@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611329@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611352@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611355@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2210611360@mahasiswa.upnvj.ac.id

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah dunia menjadi tanpa batas, memicu perubahan sosial yang cepat dan signifikan. Meskipun teknologi informasi memberikan kontribusi positif untuk peningkatan kesejahteraan, di sisi lain, dapat digunakan sebagai sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum. Saat ini, rezim hukum baru yang dikenal sebagai Hukum Siber lahir sebagai respons terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Terdapat dampak positif dan negatif dari keberadaan teknologi informasi, dengan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga risiko sebagai sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum, salah satunya adalah keterlibatan teknologi dalam perlindungan Hak Cipta dan Merk. Hak atas kekayaan intelektual (HKI) menjadi penting untuk melindungi karya orisinal dari klaim atau pengakuan yang tidak sah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Artikel ini membahas peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam melindungi hak cipta dari ancaman kejahatan siber, evaluasi efektivitasnya, dan strategi negara dalam melindungi kekayaan intelektual. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hak cipta di era digital, menyoroti keberhasilan dan tantangan dalam menanggulangi kejahatan siber terkait hak cipta.

Kata Kunci: *Cyber Law*, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.

Abstract

The development of information technology has transformed the world into a boundless space, triggering rapid and significant social changes. While information technology contributes positively to improving well-being, on the other hand, it can be effectively used as a means for unlawful activities. Currently, a new legal regime known as Cyber Law has emerged in response to the utilization of information technology. There are both positive and negative impacts of information technology, with benefits in enhancing prosperity but also risks as an effective tool for unlawful activities, including its involvement in the protection of Copyright and Trademark. Intellectual Property Rights (IPR) become crucial to safeguard original works from unauthorized claims or recognition. This research employs a qualitative descriptive approach, collecting data from various sources. The article explores the role of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in protecting copyrights from cybercrime threats, evaluates its effectiveness, and delves into the state's strategies for safeguarding intellectual property. Thus, this study yields a profound understanding of copyright protection in the digital era, highlighting both successes and challenges in addressing cyber crimes related to copyrights.

Keywords: *Cyber Law, Intellectual Property Rights, Copyrights.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menimbulkan perubahan sosial yang berlangsung demikian cepat dan signifikan. Keberadaan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi informasi bermanfaat sebagai sarana kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan. Namun, di sisi lain, teknologi informasi dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Hukum bersifat progresif ketika hukum dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal sebagai Hukum Siber. Hukum Siber didefinisikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini digunakan untuk istilah hukum terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.²

Memiliki karya yang berasal dari pikiran, ide, dan kreativitas pribadi merupakan suatu kebanggaan. Setiap karya tentunya memiliki karakteristik uniknya sendiri,

¹ Ramli, A. M. (2004). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm.1.

² Ramli, A. M. *loc.cit.*

mencerminkan keistimewaan yang berbeda-beda dari setiap individu. Melalui produk yang dihasilkan, seseorang dapat meraih manfaat ekonomis, seperti menciptakan merek dagang dari produknya. Atau, bisa juga hanya merasakan kepuasan dengan membagikannya secara daring dan menerima apresiasi dari masyarakat atas karyanya.

Dengan tujuan mendapatkan pengakuan resmi, beberapa individu mendaftarkan produk kreatif mereka untuk mencegah klaim atau pengakuan terhadap karya yang serupa sebagai hasil penciptaan mereka yang orisinal dan belum pernah ada sebelumnya. Meskipun hak paten dianggap sebagai cara tunggal untuk mencegah plagiarisme, terdapat hambatan ketika karya-karya tersebut masih dapat diakses secara ilegal di internet, membuatnya bukanlah solusi yang sepenuhnya efektif.

Cybersquatting adalah tindakan mendaftarkan domain yang terasosiasi dengan nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha mencari keuntungan dengan menjualnya kepada perusahaan tersebut.³ Salah satu keterlibatan teknologi informasi saat ini adalah pengaruh terhadap keberadaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI). Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran Hak Cipta dan Merek melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang sering terjadi. Di samping itu pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik juga merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan mengingat tindakan carding, hack-ing, cracking dan *cybersquatting* telah menjadi bagian dari aktivitas internet.

Menyikapi maraknya kejahatan *cybersquatting* tersebut, pemerintah telah mengambil upaya tegas dengan mengeluarkan peraturan, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada penulisan ini penulis akan membahas bagaimana peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam melindungi hak cipta sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual dari ancaman kejahatan siber, dan sejauh mana efektivitasnya dalam menjaga keberlanjutan hak tersebut di era digital serta

³ A. J. K. (2018, June 8). *Perlindungan Hukum di Indonesia atas Tindakan Cybersquatting* - Klinik Hukumonline. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-di-indonesia-atas-tindakan-icybersquatting-i-cl6560/>

strategi yang diberikan negara dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual dari ancaman kejahatan siber.

Tinjauan Pustaka

Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak atas kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Right* (IPR) yang seiring dengan perkembangannya di Indonesia berubah menjadi Hak kekayaan intelektual dan selanjutnya berubah menjadi Kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁴

Hak kekayaan intelektual diatur dalam UU No.28 Tahun 2004 Peraturan yang mengatur hak kekayaan intelektual lainnya terdapat pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 1 menjelaskan mengenai informasi elektronik yakni "*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*" sedangkan pada Angka 2 menjelaskan mengenai transaksi elektronik yaitu "*Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.*"⁵

Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan UU ITE merupakan salah satu langkah kepedulian pemerintah terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi agar dapat diakses secara aman serta memberikan kepastian

⁴ Sinaga, N. A. (2020). PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144–165. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>

⁵ Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

hukum terutama dalam menanggulangi *cyber crime* hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya UU ITE kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶

Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya ciptaannya, selain itu pencipta juga berhak atas hak materil atau manfaat ekonomi yang timbul dari hasil ciptaannya.⁷

Peraturan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang di dalamnya sekaligus berkesinambungan dengan Hak kekayaan intelektual, tercantum pada bagian menimbang dengan poin a menyatakan *"bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*⁸

Metode

Metode yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan banyak data dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu. Penulis mengembangkan pola hubungan atau korelasi antara data yang dikumpulkan dengan variabel yang menjadi pokok penelitian dalam artikel ilmiah ini.

Instrumen atau sumber data yang digunakan dalam pembuatan artikel ini berupa jurnal, penelitian, dan artikel terdahulu sehingga dapat menghasilkan konklusi yang akurat terkait topik yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran UU ITE dalam Melindungi Hak Cipta dan Efektivitas Perlindungan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan UU ITE merupakan kebijakan yang terbentuk sebagai suatu respons terhadap

⁶ Putri, B. T., Ramli, T. S., & Mayana, R. F. (2023). Penerapan Digital Iproline: Tinjauan UU ITE dan Perspektif Kekayaan Intelektual. *COMSERVA*, 2(12), 2892–2903. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i12.708>

⁷ Raihana, R. (2023). Analisis yuridis pengaturan tentang hak cipta di Indonesia. *j-innovative.org*. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.456>

⁸ Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

perkembangan teknologi informasi dan internet yang mana secara masif dan pesat tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan adanya dorongan perkembangan digitalisasi. Kebijakan UU ITE sendiri secara resmi berlaku pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa perubahan sejak masa peresmiannya. Selama diberlakukannya UU ITE, kebijakan tersebut telah memegang kendali dalam mengatur transaksi elektronik, perlindungan data privasi, hingga penggunaan internet dan media sosial yang ramai dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan UU ITE di Indonesia menjadi salah satu kebijakan penting untuk melindungi masyarakat dari adanya ancaman kejahatan siber. Selama ini, telah banyak kasus *cybercrime* atau kejahatan siber yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah pelanggaran hak cipta dimana tindakan ilegal tersebut dilakukan secara daring dan melibatkan pelanggaran terhadap hak cipta suatu karya.⁹

Suatu hasil karya memiliki pihak perorangan maupun kelompok yang membuat sehingga dapat disebut pencipta dengan karya imajinatif dan kreatif, serta ciri khas tersendiri. Adanya pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan atau pencurian terhadap hasil karya milik orang lain, plagiarism atau penyalahgunaan hak kekayaan intelektual milik orang lain, penyalahgunaan gambar demi kepentingan pribadi tanpa izin, dan penyalahgunaan lagu atau instrumen musik tanpa menyebutkan sumber. Dengan demikian, UU ITE sebagai salah satu alat penegak hukum atas ancaman kejahatan siber dalam kasus pelanggaran hak cipta yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1997. Keberadaan UU ITE melalui pasal-pasal pendukung perlindungan Hak Cipta telah memberikan peran penting guna menghindari adanya pelanggaran yang dilakukan kelompok tidak bertanggung jawab. Kebijakan tersebut telah menegaskan larangan pelanggaran Hak Cipta dalam konteks *online*, menetapkan sanksi terhadap pelanggar, penutupan akses situs web yang melanggar hak cipta hingga berperan dalam penguatan perlindungan privasi karya-karya.¹⁰

Dalam penerapannya, efektivitas dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi (UU ITE) berhasil memberikan dampak positif yang signifikan khususnya terhadap situs web ilegal yang menyajikan film streaming secara gratis tanpa adanya hak atau izin beredar kepada pencipta karya film. Selain itu, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga telah mengatur mengenai sanksi hukum pidana bagi para

⁹ Ramadhani, "Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol.1 No.1, (2023), 89-97.

¹⁰ Surniandari, "UU ITE dalam Melindungi Hak Cipta sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari Cybercrime", *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, Vol.16 No.1, 1-11.

pelaku kejahatan siber yang melakukan pelanggaran hak cipta, yakni dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda sebesar RP. 4.000.000.000 (4 milyar rupiah). Selain itu, efektivitas daripada dasar hukum untuk menegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di dunia digital memberikan kesadaran hukum serta edukasi terkait hak cipta di kalangan masyarakat, bisnis dan pelaku industry. Sehingga dapat dikatakan bahwa peran UU ITE selama ini memberikan hasil perubahan yang efektif serta solutif terhadap kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia. Tidak sedikit situs web yang ditutup dengan peringatan adanya pelanggaran Hak Cipta, serta adaptasi pemerintah terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam menjaga perlindungan Hak Cipta di era digital. Sebuah penelitian juga merepresentasikan peranan efektivitas daripada Undang-Undang Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan adanya kasus pelanggaran Hak Cipta melalui media sosial TikTok dikarenakan lemahnya kebijakan aplikasi tersebut dalam melindungi karya cipta sinematografi. Hal ini dikarenakan banyaknya spoiler film atau potongan suatu film yang disebarluaskan tanpa izin pencipta, sehingga sudah jelas jika aplikasi TikTok telah melanggar hukum Peraturan Hak Cipta karya sinematografi, Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh media sosial tersebut, yakni memblokir seluruh video terkait yang mana tindakan tersebut menjurus kepada tindakan pembajakan film.¹¹ Melalui penelitian tersebut dapat dilihat bahwa masih perlu adanya pengawasan dan penyesuaian terhadap kebijakan media sosial dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Strategi yang Diberikan Negara dalam Memberikan Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual dari Ancaman Kejahatan Siber

Berbagai strategi telah diberikan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kejahatan *cybercrime*. Dalam rangka menanggulangi kejahatan siber diperlukan strategi yang simultan dari Negara dan Strategi pencegahan kejahatan siber dapat dilakukan melalui dua fokus utama yakni, usaha mencegah pelanggaran yang pertama dan usaha mencegah penanggulangan pelanggaran dan kejahatan.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan siber, maka diperlukan *cyber security*. Namun, realitanya penerapan *cyber security* memang sangat kompleks. Untuk itu memerlukan pendekatan multidimensional. Karenanya, untuk meningkatkan tata

¹¹ Syahrul Yaumil, Skripsi: "Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film di Media Sosial Tiktok dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), Hal. 33.

kelola *cyber security*, pelaksanaan prinsip multi pihak (multi stakeholderism) menjadi sangat penting. Tanpa adanya kerja sama dan kolaborasi di kalangan pemangku kepentingan (dari lembaga layanan publik hingga sektor swasta, akademisi dan masyarakat sipil), *problem solving* isu terkait *cyber security* akan terus menjadi satu dimensi dan tidak lengkap¹². Maka dari itu, diperlukan sebuah mekanisme inklusif yang dapat mengesahkan keputusan sekaligus reflektif dan responsif terhadap kepentingan nasional dan populasi yang terdampak. Kerjasama internasional sangat diperlukan, terkait dengan pengembangan dan penguatan kapasitas kemampuan *cyber security* baik itu untuk infrastruktur, sarana prasarana maupun dalam pengembangan kemampuan SDM dalam bidang *cyber security* baik bilateral antar dua negara maupun regional atau internasional. Peningkatan kerja sama teknologi informasi dan *cyber security* selain itu juga diharapkan mampu membuka peluang bagi pengembangan industri media baru terkait dengan teknologi informasi di Indonesia sebagai salah satu bagian dari pengembangan industri strategis Nasional.

Dalam rangka menerapkan kebijakan kriminal perlu dikombinasikan dengan berbagai aktivitas pencegahan dan pembenahan infrastruktur agar semua langkah terkoordinasi secara menyeluruh dalam suatu pengorganisasian aktivitas yang sistematis. Selain kebijakan preventif dan represif, penanggulangan kejahatan juga dapat dilaksanakan dengan cara melakukan kebijakan kriminalisasi karena didalam kebijakan tersebut terkandung aspek ancaman pidana yang dapat mempengaruhi pikiran atau bahkan dapat menyebabkan rasa takut kepada orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan. Hal ini dapat mempunyai dampak psikologis bagi masyarakat, terutama bagi orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan sehingga mereka tidak jadi melakukan kejahatan.

Haruslah diakui pula bahwa beberapa negara di dunia dewasa ini belum memiliki aturan secara khusus di bidang telematika. Namun, Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang teknologi informasi yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 april 2008. Signifikansi perkembangan teknologi komputer dengan telematika mengharuskan filosofi adanya aturan atau norma sebagai suatu yang tidak dapat diabaikan lagi.

¹² Ardian Infantono, "Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional Di Era Society 5.0", Jurnal Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia, Vol.3, (2021), hlm 223-234.

Dalam kaitanya dengan upaya memerangi *cybercrime* melalui sarana non penal, perlu dirumuskan dahulu model undang-undang payung (*umbrella act*) yang mengatur tentang kebijakan tentang komunikasi massa baik yang berbentuk cetak, penyiaran maupun *cyber*. Selain itu, perlu dirumuskan secara profesional penyusunan kode etik, *Code Of Conduct And Code Of Practice* tentang penggunaan teknologi informatika. Kerjasama antar semua pihak yang terkait juga diperlukan. Termasuk kalangan industri untuk mengembangkan *preventive technology* menghadapi *cybercrime*, sebagai contoh adalah pengembangan *cyber patrol software* yang dapat digunakan oleh Internet Service Provider (ISP) atau Internet Content Provider (ICP) untuk menyaring atau memblokir akses ke situs tertentu secara otomatis apabila situs tersebut telah masuk dalam *blacklist*. Hal ini didasarkan fakta bahwa internet memang bukanlah jaringan yang aman dari ancaman kejahatan.

Dalam ruang lingkup nasional perlu disusun suatu aksi rencana nasional (National Plan For Action) untuk menanggulangi *cybercrime*, karena proses viktimisasi kejahatan tersebut sangat luas dan sifatnya transnasional. Pemerintah dan beberapa komunitas teknologi informasi nasional perlu menggalang kerjasama guna menanggulangi kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Kegiatan tersebut misalnya melalui pendirian Indonesia On Forum Information For Infocom Incident Response And Security Team (ID-FIRST) yang diharapkan menciptakan sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan industri teknologi informasi dalam mencegah dan memberantas kejahatan dunia maya melalui internet.

Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang telah kami tinjau, berbagai cara dan metode guna menanggulangi kejahatan siber (*cyber crime*) khususnya terkait hak cipta suatu karya telah dilakukan. Peraturan dan badan-badan yang telah dibentuk dalam rangka memberantas kejahatan siber terkait hak cipta telah diterapkan tidak hanya di Indonesia saja namun juga telah diterapkan di seluruh penjuru dunia, hal ini dikarenakan kejahatan terkait hak cipta atas karya sinematografi ataupun bentuk-bentuk karya yang memiliki hak cipta lainnya berada di kelas transnasional dikarenakan pelaku kejahatan dapat berada dimana saja di seluruh penjuru dunia.

Mengingat perkembangan teknologi yang sangat luas, jumlah data yang diinput ke dalam data base pada server yang tidak terhitung jumlahnya, ketersediaan berbagai

macam VPN dan Proxy, amatlah sulit untuk menemukan dan mengusut para pelaku utama tindak kejahatan siber terkait hak cipta.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, Indonesia memiliki UU ITE yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan siber (*cyber crime*) UU ITE sendiri telah terbukti berdampak positif dan cukup besar dalam penanggulangan situs film ilegal namun belum dapat menanggulangi ataupun menerapkan sanksi hukum terhadap pelanggar hak cipta oleh oknum di luar negeri, Beberapa saran terkait sarana dan prasarana yang sekiranya dapat menanggulangi permasalahan tersebut telah diberikan, salah satunya tindakan Pemerintah dan beberapa komunitas teknologi informasi nasional yang dirasa perlu menggalang kerjasama guna menanggulangi kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) misalnya melalui pendirian Indonesia On Forum Information For Infocom Incident Response And Security Team (ID-FIRST) yang diharapkan menciptakan sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan industri teknologi informasi dalam mencegah dan memberantas kejahatan dunia maya melalui internet.

Berjalannya program tersebut ditambah dengan adanya UU ITE belum dapat menjamin kepastian hukum terkait pelanggaran hak cipta di dunia maya. Dapat disimpulkan bahwa cakupan yang terlalu luas, perkembangan teknologi, serta keterbatasan Yurisdiksi (Nasional-Internasional) merupakan tantangan dan hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber (*cyber crime*) khususnya pelanggaran hak cipta di dunia maya.

Saran

Dalam upaya memberantas kejahatan siber (*cyber crime*) khususnya terkait pelanggaran hak cipta di dunia maya dibutuhkan kerjasama dan sinergi antar Pemerintah, Kepolisian, Badan Kejahatan Siber, dan kerjasama antar negara dengan membuat berbagai perjanjian salah satunya yang sekiranya dapat berdampak besar yakni perjanjian ekstradisi, hal ini bertujuan untuk memperluas cakupan yurisdiksi dari suatu negara guna menegakkan hukum atas pelanggaran terkait hak cipta yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan siber (*cyber crime*).

Kejahatan siber (*cyber crime*) merupakan jenis kejahatan yang berdampak besar dikarenakan telah menimbulkan kerugian yang tidak terhitung jumlahnya, hal ini telah menjadi kekhawatiran dan perhatian berbagai negara. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa dengan menerapkan dan membuat perundang-undangan

hukum telematika dalam skala dan tingkat internasional akan tercipta yurisdiksi yang luas dan berkepastian hukum yang kemudian dapat menanggulangi kejahatan tingkat transnasional ini.

Referensi

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- A. J. K. (2018, June 8). *Perlindungan Hukum di Indonesia atas Tindakan Cybersquatting - Klinik Hukumonline*. [hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-di-indonesia-atas-tindakan-icybersquatting-i-cl6560/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-di-indonesia-atas-tindakan-icybersquatting-i-cl6560/)
- Ardian Infantono, "Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional Di Era Society 5.0", Jurnal Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia, Vol.3, (2021), hlm 223-234.
- Ramadhani, F. (2023). Dinamika UU ITE sebagai Hukum Positif di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(1), 89–97. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i1.98>.
- Ramadhan, M. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 1844-1850. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Surniandari, A. (2016). UU ITE dalam Melindungi Hak Cipta sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari Cybercrime. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 16(1), 1-11. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/download/1276/1048>.
- Yaumil, S., (2023). Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film di Media Sosial Tiktok dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73316>.

Sinaga, N. A. (2020). *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144–165. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>

Raihana, R. (2023). Analisis yuridis pengaturan tentang hak cipta di Indonesia. *j-innovative.org*. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.456>

Putri, B. T., Ramli, T. S., & Mayana, R. F. (2023). Penerapan Digital Iproline: Tinjauan UU ITE dan Perspektif Kekayaan Intelektual. *COMSERVA*, 2(12), 2892–2903. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i12.708>